

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

2017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II RUANG LINGKUP TATA KELOLA	6
BAB III KEPEMILIKAN SAHAM	19
BAB IV STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI & DEWAN KOMISARIS	20
BAB V FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI	21
BAB VI PENYIMPANGAN INTERN DAN PERMASALAHAN HUKUM SERTA UPAYA PENYELESAIAN	23
BAB X BENTURAN KEPENTINGAN.....	24
BAB XI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	25
BAB XII <i>CORPORATE GOVERNANCE ASSESMENT</i>	29
BAB XII PENUTUP	30

KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merta akan berdampak pada pola hidup dan perilaku manusia, termasuk dalam hal ini pola dan perilaku tata kelola keuangannya. Bank sebagai lembaga layanan jasa keuangan pastinya akan berakselerasi dengan perkembangan IPTEK tersebut, tiada lain adalah untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabah dalam menatakelola keuangannya. Kebijakan perluasan dan peningkatan model layanan, penyesuaian produk-produk bank terhadap kebutuhan masyarakat kekinian, akan berjalan seiring dengan meningkatnya potensi risiko yang dapat berdampak kerugian pada bank baik secara material (financial) maupun non materil.

Hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menjadi instrument penting dalam mengawal peningkatan aktifitas dan kinerja bank, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan menjaga serta meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.

BPR Hasamitra berupaya menjalankan aktifitas usahanya untuk selalu tunduk pada tata aturan yang berlaku dan berusaha menjalankan prinsip tata kelola yang dimaksudkan dalam POJK diatas yang selanjutnya dipaparkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra tahun 2017 ini yang sekaligus pemenuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan tersebut sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Semoga bisa memberikan gambaran yang diharapkan.

PT BPR Hasa Mitra,




I Nyoman Supartha, CRBD
Direktur Utama
Yonggris
Komisaris Utama

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman akan beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perubahan pola hidup dan sikap umat manusia secara umum termasuk dalam hal pengelolaan keuangannya. Perkembangan tersebut juga berdampak pada hadirnya beragam produk jasa keuangan perbankan dan berimplikasi pada timbulnya kompleksitas potensi risiko yang dapat terjadi. Sadar akan hal tersebut maka upaya perimbangan sebagai tindakan kehati-hatian serta antisipasi terhadap hadirnya potensi risiko maka Tata Kelola Bank menjadi hal yang penting dan dibutuhkan.

Dengan Tata Kelola yang baik, tentunya perusahaan diharapkan tetap survive di tengah-tengah persaingan bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Manajemen dan segenap *Stakeholder* akan lebih menguatkan kepercayaannya kepada bank, dan secara internal SDM juga akan lebih meningkat produktifitas kinerjanya disebabkan karena tugas dan tanggung jawab yang jelas serta selalu terlindungi dengan regulasi yang mengatur.

Prinsip-prinsip dasar dalam menerapkan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sedikitnya ada 5 (lima) hal sebagaimana yang diuraikan pada POJK yang disebutkan di atas, yakni:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan bank dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

4. Independen (*independency*)

Pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Kelima prinsip Tata Kelola di atas, menjadi pilar penting dalam usaha mewujudkan visi BPR Hasa Mitra sebagai “Bank Lokal Bereputasi Nasional yang Sehat, Kuat, dan Terpercaya”. Oleh karenanya BPR Hasa Mitra memiliki komitmen yang kuat untuk dapat mengimplementasi prinsip tata kelola tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan praktek terbaik (*best practices*) GCG. Dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra tahun 2017 ini, menjadi salah perwujudan dari prinsip tata kelola untuk memberikan informasi kepada segenap *stakeholders* PT BPR Hasa Mitra.

BAB II

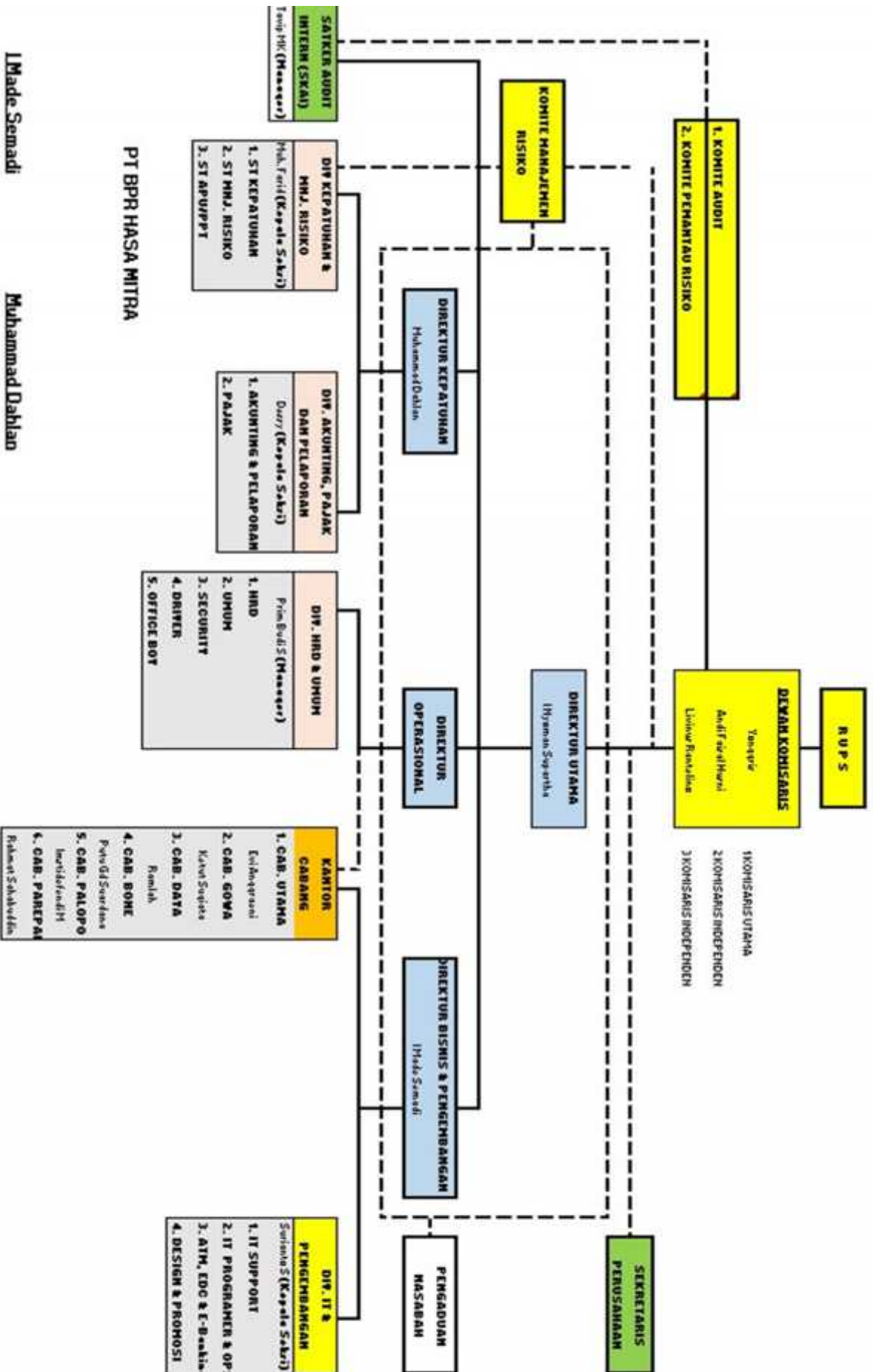
RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Ruang Lingkup Tata Kelola, merujuk pada POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penerapan Tata Kelola harus mewujudkan sedikitnya 9 (Sembilan) bentuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
6. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk system pengendalian intern
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit
8. Rencana Bisnis BPR
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Sebelum menguraikan ke-9 (Sembilan) hal tersebut di atas, terlebih dahulu kami gambarkan struktur organisasi yang memberikan ilustrasi Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra.

Struktur Organisasi PT. BPR Hasa Mitra



I Made Semadi
 Dir. Bisnis & Pengembangan

Muhammad Dahan
 Direktur Kepatuhan

Dalam komponen utama Struktur Organisasi Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis & Pengembangan, dan Direktur Kepatuhan.

Komite yang ada secara legalitas perusahaan adalah Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang berada dibawah Koordinasi Komisaris Independen, serta beberapa komite yang secara operasional berfungsi berdasarkan peruntukannya masing-masing:

- a. Komite Kredit
- b. Komite Manajemen Risiko
- c. Komite Pertimbangan Pegawai.
- d. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Komite ALCO, meskipun secara struktur belum terbentuk, namun fungsi pengelolaan terhadap aset telah dijalankan secara koordinatif dan berdasar pada olah data khususnya rasio-rasio yang berhubungan dengan likuiditas BPR.

Selain itu dalam rangka menunjang pelaksanaan Tata Kelola bisa berjalan dengan baik dan juga untuk memenuhi kewajiban POJK Tata Kelola, Manajemen telah membentuk Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan praktek operasional bank sudah sejalan dengan tata aturan dan regulasi yang ada.

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, amanat Anggaran Dasar Perseroan menetapkan 3 (tiga) orang Direksi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Supartha	Direktur Utama
2	I Made Semadi	Direktur Bisnis & Pengembangan
3	Muhammad Dahlan	Direktur Kepatuhan

Semua Direksi telah mengantongi Sertifikasi Kompetensi Direksi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyatakan kompeten untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dan ketiga-tiganya adalah mantan praktisi perbankan pada bank umum. Tentunya hal ini menjadi modal kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan.

Direksi juga dapat menjaga independensinya, karena semua Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Selain itu kelangsungan operasional perusahaan diharapkan selalu dapat berjalan normal ditunjang dengan intensitas kehadiran setiap Direksi, karena letak domisilinya sangat terjangkau ke Kantor Pusat BPR. Saat ini domisili Dewan Direksi masing-masing di Kota Makassar dan Gowa (Kabupaten yang bersebelahan dengan Kota Makassar), dengan jarak dan waktu tempuh yang relative dekat dan cepat. Kehadiran berkantor Dewan Direksi menunjuk pada hari kerja perusahaan yakni 6 (enam) hari dalam seminggu.

Tugas & Taggung Jawab Direksi

Berikut kami uraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing Direksi.

I. Direktur Utama

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalisasikan potensi pasar.
- b. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) maupun jangka panjang Perseroan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjalankan usaha perseroan sesuai tugas, kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan, dengan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien.
- e. Memberikan kuasa kepada tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/atau kepada pegawai dan atau Struktur Pendukung Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi.
- f. Merumuskan dan menetapkan tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja (*Board Manual*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- g. Merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen risiko.
- h. Memastikan dilaksanakannya dengan baik kebijakan pengelolaan risiko oleh penanggungjawab di setiap tingkatan.

- i. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan dalam hal:
 -) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
 -) Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko.
 -) Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan.
 -) Memfasilitasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.
- j. Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya-upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.
- k. Bersama-sama dengan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional melakukan koordinasi untuk membahas indikator keuangan, SDM, pemasaran dan aspek lainnya untuk selanjutnya melaporkannya ke Dewan Komisaris baik diminta ataupun tidak.
- l. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
- m. Menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas lainnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

II. Direktur Bisnis dan Pengembangan

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalkan potensi pasar.
- b. Membantu Direktur Utama dalam bidang bisnis baik dari sisi penghimpunan pendanaan ataupun penyaluran kredit dan pengembangan perusahaan dalam konteks ekspansif dan pengembangan system teknologi informasi.
- c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku .
- d. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di Bank telah mempertimbangkan risiko-risiko yang berpotensi dapat terjadi.
- f. Menetapkan pedoman dan kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi kredit dan *risk appetite* Bank.

- g. Memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat serta pengawasan kepada pegawai didalam lingkup pekerjaannya serta melaporkan kepada Direktur Utama.
- h. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah. Batas maksimal akan diatur tersendiri melalui keputusan Dewan Komisaris.
- i. Menyalurkan dan memasarkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk pemberian kredit dengan tepat (*prudential banking*) sesuai dengan batas kewenangan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
- j. Memantau portofolio kredit dan pembiayaan termasuk eksposur risikonya, baik *on balance sheet* maupun *off blance sheet* serta pemantaunnya.
- k. Melakukan penyelenggaraan administrasi penghimpunan dana dan peyaluran dana secara baik dan benar.
- l. Melakukan negosiasi langsung dengan pihak ketiga dalam rangka penetapan tingkat margin bunga baik penghimpunan dana dan penyaluran kredit berdasarkan ketentuan dan kewenangan dalam rangka pengembangan pasar serta melaporkannya kepada Direktur Utama serta Komisaris.
- m. Bertugas untuk menangani aspek kepatuhan pada regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga lain agar tercapai tingkat kualitas kesehatan bank secara berkesinambungan.
- n. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan Direksi Operasional melakukan koordinasi untuk membahas indikator keuangan, SDM, pemasaran dan aspek lainnya.
- o. Menetapkan dan memantau Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang agar sasaran/arrah strategi dan kebijakan kredit, anggaran dan rencana kerja dapat tercapai dan terukur, kemudian mempertanggung jawabkannya kepada Komisaris dan pemegang saham.
- p. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam *Rencana Bisnis Bank* dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
- q. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia atau lembaga lain.
- r. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
- s. Melakukan penelitian dan pengembangan kredit berdasarkan analisa SWOT. Mengkaji, menganalisa dan menetapkan, memutuskan kebijakan-kebijakan strategis antara lain

penghimpunan dana, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian resiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat terarah dan optimal dengan tetap mengacu pada *market oriented*.

- t. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta ikut hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

III. Direktur Operasional (saat ini dirangkap oleh Direktur Utama)

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalkan potensi *niche market*.
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- d. Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) melalui aktivitas pengelolaan kekayaan (aktiva) bank dengan melakukan pegaturan, pengukuran serta menjaga keseimbangan antara asset dan kewajiban dengan memperhatikan rasio-rasio sehat BPR khususnya rasio likuiditas bank.
- e. Memastikan agar praktek-praktek akuntansi dan pembukuan bank sesuai dengan ketentuan dengan penerapan manajemen risiko dan praktek-paraktek tata kelola pengelolaan dana bank secara baik dan produktif.
- f. Kecukupan dan alokasi SDM yang dimiliki sesuai dengan keahliannya dan meningkatkan profesionalisme SDM BPR melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- g. Tersedianya sarana dan prasarana dibidang logistik, ATK, Inventaris, pengamanan serta pemeliharaan seluruh aset bank secara baik dan benar.
- h. Penerapan, pengawasan dan pelaksanaan APU-PPT dan UU-TPPU.
- i. Menganalisa laporan keuangan bank setiap saat serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris apabila terjadi kondisi permasalahan keuangan bank.
- j. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti pengamanan TI dan manajemen risiko terkait dengan penggunaan TI.
- k. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh aset bank serta memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat kepada semua karyawan dalam mencapai maksud dan tujuan dari PT BPR Hasa Mitra.
- l. Penatausahaan hak dan kewajiban karyawan dan pengurus bank berdasarkan ketentuan tenaga kerja dan perusahaan.

- m. Menetapkan gaji, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan kesejahteraan karyawan, serta menganalisa kinerja karyawan guna pengembangan karir serta memberikan sanksi bagi SDM yang melanggar disiplin.
- n. Secara koordinasi bersama-sama dengan Dewan Direksi menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja jangka pendek maupun jangka menengah, panjang dan menetapkan langkah strategis dalam mengakselerasi pencapaian target-target Perseroan.
- o. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya.
- p. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
- q. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

IV. Direktur Kepatuhan

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dalam rangka optimalisasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.
- b. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan 5 (lima) prinsip yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- c. Menyusun pedoman kerja, system, prosedur dan kode etik kepatuhan.
- d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Hasa Mitra telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- e. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Hasa Mitra supaya tidak menyimpang dari kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

- g. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- h. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR.
- i. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
- j. Merumuskan konsep dan strategi dalam rangka membangun budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi perusahaan.
- k. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala setiap akhir Desember paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar.
- l. Menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditemukannya penyimpangan tersebut ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua di Makassar.
- m. Memantau dan memastikan penyelesaian komitmen yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya.

Meskipun Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berbeda, namun tetap melakukan koordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka membangun sinergitas dan harmonisasi kerja. Bentuk koordinasi yang dimaksudkan antara lain melalui rapat-rapat resmi, perbincangan informal secara langsung dan/atau tidak langsung melalui grup media social tertutup Direksi atau Manajemen.

Salah satu jenis rapat resmi yang rutin dilakukan adalah Rapat Pimpinan yang menghadirkan segenap unsur pimpinan Kepala Kantor, Manager Bagian, SKAI yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaannya paling lambat minggu kedua disetiap bulannya.

Direksi juga bertanggungjawab dalam melakukan pemantauan dan memastikan realisasi tindak lanjut atas komitmen terhadap hasil temuan dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit (SKAI) Internal, maupun pemeriksa eksternal dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) atau dari Lembaga/Otoritas lainnya.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertugas memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR Hasa Mitra pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada dalam BPR Hasa Mitra.

I. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.
- b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris aktif memantau pertumbuhan indikator penting usaha BPR yakni pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, peningkatan biaya, dan besaran pendapatan termasuk memperhatikan *indicator* rasio keuangan yang menjadi parameter pengukuran kesehatan bank seperti rasio likuiditas, rasio NPL, rasio BOPO, ROA, NIM dan yang lainnya. Termasuk juga mengamati potensi-potensi risiko yang dapat

terjadi seperti risiko bisnis/pasar, risiko strategik, *issue-issue* APU PPT, Fraud, dan *issue-issue* eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran bisnis BPR Hasa Mitra.

Selain itu Dewan Komisaris juga aktif mencari informasi terkait regulasi-regulasi terkini yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan atau lembaga/institusi yang terkait dengan operasional BPR.

Dewan Komisaris juga aktif memantau pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI atau pemeriksa eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) serta mengawal proses tindak lanjut dan komitmen atas temuan-temuan yang ada.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Audit yang diharapkan dapat membantu dan mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Komisaris. Masing-masing Komite dikoordinatori oleh Komisaris Independen. Hal ini juga sebagai kewajiban pemenuhan struktur yang dipersyaratkan dalam POJK dan SE OJK Tata Kelola bagi BPR.

II. Susunan anggota Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra

No	Nama	Jabatan
1	Yonggris Lao	Komisaris Utama
2	Andi Faisal Husni	Komisaris Independen
3	Livinus Rantelino *)	Komisaris Independen

Ket)* Bapak Livinus Rantelino telah diajukan pada awal tahun 2017, hanya saja yang bersangkutan belum memenuhi syarat Calon anggota Dewan Komisaris Independen karena belum memiliki Sertifikat Sertifikasi Komisaris dari Lembaga Sertifikasi yang diakui, menyebabkan Beliau untuk harus menunggu adanya pelaksanaan Pendidikan Sertifikasi dimaksud.

Yang bersangkutan mengikuti pelatihan dimaksud dan dinyatakan kompeten berdasarkan sertifikat kompetensi No. KEU.005.0191.2017 tertanggal 27 Oktober 2017. Untuk selanjutnya mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.26/KR.06/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Livinus Rantelino selaku Calon Komisaris Independen PT BPR Hasa Mitra tertanggal 7 Desember 2017.

Beliau ditetapkan dalam Keputusan Di luar Rapat Pemegang Saham (Sirkuler) pada tanggal 28 Desember 2017 dan telah diakta notaris dihadapan Notaris Michiko Sodikim, SH.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI KOMITE

Kelengkapan pelaksanaan tugas komite, telah dipenuhi oleh BPR Hasa Mitra berdasarkan POJK dan SEOJK Tata Kelola sebagai berikut:

a. Komite Audit

Komite Audit BPR Hasa Mitra telah terbentuk yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Komposisi Komite Audit tersusun sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Latar Belakang
1	Andi Faisal Husni	Ketua Komite (Kom. Independen)	Bankir
2	Livinus Rantelino	Anggota	Bankir (Ex. Audit May Bank)
3	Dr. Syamsuddin, SE, Msi, Akuntan, CA	Anggota	Akademisi expert di bid. keuangan

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sedikitnya 2 (dua) kali di periode tahun 2017.

b. Komite Pemantau Risiko.

Kurang lebih sama dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko juga telah terbentuk dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Latar Belakang
1	Andi Faisal Husni	Ketua Komite (Kom. Independen)	Bankir (BI)
2	Livinus Rantelino	Anggota	Bankir (Ex. Audit May Bank)
3	Anas Iswanto A	Anggota	Akademisi – Nara Sumber Lembaga Certif LPPI Bid. Manaj.Risiko

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sedikitnya 2 (dua) kali di periode tahun 2017.

c. Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko adalah Komite betukan Dewan Direksi berdasarkan SK No.007/SK.DIR/BHM-MKS/0617 (terlampir). Komite ini yang diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka penguatan kelembagaan BPR Hasa Mitra sehingga tetap sehat, kuat dan terpercaya. Menjaga serta meningkatkan reputasi dalam rangka peningkatan daya saing untuk tetap tumbuh stabil dan berkelanjutan.

d. Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Divisi ini mengemban misi untuk memastikan kepatuhan bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Selain fungsi kepatuhan divisi ini bertanggungjawab juga membantu Direktur Kepatuhan untuk tata kelola manajemen risiko dan pemantauan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT).

Dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, Direksi telah menerbitkan Pedoman Kerja, System dan Prosedur Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Beberapa fungsi Komite dan satuan kerja yang telah dibentuk sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Komite Kredit;
- b. Komite Pertimbangan Pegawai (KP2)
- c. Satuan Kerja Audit Intern.

Komite dan satuan kerja yang disebutkan diatas telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman dan tata kerja masing-masing

BAB III

KEPEMILIKAN SAHAM

A. Dewan Direksi

Posisi 31 Desember 2017, kepemilikan saham Dewan Direksi pada BPR Hasa Mitra adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemiikan Saham	Prosentase
I Nyoman Supartha	Direktur Utama	Tidak Ada	-
I Made Semadi	Direktur Bisnis	Tidak Ada	-
Muhammad Dahlan	Direktur Operasional	Tidak Ada	-

A. Dewan Komisaris

Posisi 31 Desember 2017, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPR Hasa Mitra adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Persentase %
Yonggris Lao	Komisaris Utama	Ada	86,93%
Andi Faisal Husni	Komisaris Independen	Tidak Ada	-
Livinus Rantelino	Komisaris independen	Tidak Ada	-

BAB IV

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

I. Jumlah Remunerasi Anggota Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain untuk Dewan Komisaris	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin)	2	938.393.457
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang:		
a. Dapat dimiliki		
b. Tidak dapat dimiliki	1	44.154.000
TOTAL		982.547.457
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun		
Di atas Rp. 2 Milyar	-	
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	-	
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	1	
Rp. 500 Juta ke Bawah	1	

II. Jumlah Remunerasi Anggota Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain untuk Dewan Direksi	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	3.198.104.960
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang:		
c. Dapat dimiliki		
d. Tidak dapat dimiliki	3	208.560.000
TOTAL		3.406.664.960
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun		
Di atas Rp. 2 Milyar	-	
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar	2	
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	1	
Rp. 500 Juta ke Bawah	-	

III. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah *
1	Karyawan - Karyawan	1	7.13
2	Direksi - Direksi	1	1.28
3	Komisaris - Komisaris	1	2.10
4	Direksi - Karyawan	1	32.98

*) : pengali gaji terendah = gaji tertinggi yang dibandingkan.

BAB V

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Dewan Komisaris BPR Hasa Mitra telah melakukan rapat sebanyak 3 kali sepanjang tahun. Kehadiran anggota Dewan Komisaris, 5 (lima) hari dalam seminggu. Dalam hal Rapat Pengurus atau Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Sabtu, maka Anggota Dewan Komisaris turut hadir pada Rapat-Rapat tersebut. Mengingat intensnya kehadiran Dewan Komisaris, sehingga pertemuan dalam bentuk formal Dewan Komisaris tidak tercatat secara khusus, kecuali untuk Rapat Pengurus yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta pada Rapat Pimpinan yang digelar setiap bulannya. Hal ini menjadi catatan kami untuk melakukan perbaikan ke depannya.

a. Rapat-rapat yang dihadiri Dewan Komisaris

No	Nama	Jenis Rapat			Kehadiran			Persentase		
		RK	RP	RPm	RK	RP	RPm	RK	RP	RPm
1	Yonggris	2	7	11	2	6	3	100%	85,7%	27,3%
2	Andi Faisal Husni	2	7	11	2	7	7	100%	100%	63,6%

Keterangan:

RK = Rapat Komisaris

RP = Rapat Pengurus

RPm = Rapat Pimpinan

b. Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Pimpinan

Dewan Direksi BPR Hasa Mitra telah melakukan rapat pimpinan sebanyak sebelas (11) kali antara lain:

No	Nama	Jenis Rapat		Kehadiran		Persentase	
		RP	RPm	RP	RPm	RP	RPm
1	I Nyoman Supartha	7	11	7	11	100%	100%
2	I Made Semadi	7	11	7	10	100%	90,9%
3	Muhammad Dahlan	7	11	7	11	100%	100%

Rapat Pimpinan merupakan forum Direksi untuk melakukan evaluasi kinerja bulanan dengan agenda rapat secara umum adalah:

-) Mendengarkan laporan dan mengevaluasi kinerja di masing-masing bagian dan kantor,
-) Mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Hasa Mitra,
-) Membahas *issue-issue* strategis yang perlu disikapi untuk kelancaran usaha perseroan,

) Dan hal lainnya; seperti kegiatan CSR, partisipasi kegiatan dll.

Proses pengambilan keputusan selalu dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

c. Rapat Komite Audit & Komite Pemantau Risiko

Selain rapat yang disebutkan di atas, Komite Independen yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal yang pada tanggal 7 Oktober 2017 dan 17 November 2017.

BAB VI

PENYIMPANGAN INTERN DAN PERMASALAHAN HUKUM

SERTA UPAYA PENYELESAIAN

Selama tahun 2017 tidak ditemukannya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, Pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank.

INTERNAL FRAUD DALAM SATU TAHUN	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus thn	Pegawai Tetap thn		Pegawai Tidak Tetap thn		
Total Fraud						
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Penyelesaian Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2017, BPR Hasa Mitra tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata, namun Bank masih dalam proses banding pajak yang sedang diselesaikan melalui peradilan pajak.

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

BAB VII

BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan BPR Hasa Mitra, Dewan Komisaris dan Direksi selalu menyelesaikan menghindari terjadinya benturan kepentingan. Meskipun ada beberapa aktifitas transaksi yang terkait dengan pengurus seperti sewa-menyewa, pengambilan fasilitas kredit, penempatan dana, tapi proses pengambilan keputusan dan perlakuan, tetap dilakukan secara professional berdasarkan pengaturan internal yang ada.

No	Jenis Transaksi	Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Keterangan
		Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	
1	Sewa Gedung Kantor	Yonggris Lao	Komisaris Utama	Dewan Direksi & Dewan Komisaris	Dewan Direksi & Dewan Komisaris	Nilai sewa sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya.
2	Sewa Mobil Operasional	I Nyoman Supartha	Direktur Utama	Dewan Direksi & Dewan Komisaris	Dewan Direksi & Dewan Komisaris	Nilai sewa dan fasilitasnya sebanding dengan nilai sewa sejenis. Masih dalam tenggat waktu kontrak sebelumnya.
3	Fasilitas Kredit	I Made Semadi	Direktur Bisnis	Komite Kredit	Direksi dan manager kredit	Suku bunga dan biaya sesuai ketentuan perusahaan

Selain transaksi yang disebutkan di atas, masing-masing pengurus berikut keluarga yang terkait memiliki rekening simpanan di BPR Hasa Mitra, namun perlakuan transaksi yang diberikan mengacu pada ketentuan internal bank yang ada. Sehingga praktis perlakuannya sama dengan nasabah lainnya.

BAB VIII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sesuai dengan Misi Perusahaan yang *"Social Bussines Enterprice"*, BPR Hasa Mitra selalu ambil bagian dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Dan karena hal ini telah dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan PT BPR Hasa Mitra tahun 2017. Untuk alokasi anggaran termasuk dalam hal ini sumbangan untuk kegiatan yang bersifat politik, Manajemen BPR Hasa Mitra tidak menganggarkannya.

Beberapa bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan BPR Hasa Mitra dalam periode tahun 2017 sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
KANTOR PUSAT & KANTOR KAS			
1	Gathering Bendahara SMA dan SMK	09 Jan 2017	Rest Sunachi
2	Berbagi Kasih di Moment Perayaan Imlek	28 Jan 2017	RS. Siloam, RS Stella Maris dan RS Awal Bros
3	Gathering Deposan	18 Feb 2017	Rest Sunachi
4	Tour Bendahara UPTD	11-14 Mei 2017	Bali, Denpasar
5	Bagi-Bagi Takjil	Juni 2017	Polres Pelabuhan
6	Anjongsana Pasien selama Ramadhan	Juni 2017	RS. Pelamonia, RS. Haji, RS. Labuang Baji
7	Buka Puasa Bersama Bendahara Instansi	16 Juni 2017	Ballroom Lt.5 BHM
8	Buka Puasa Bersama Bedahara UPTD	19 Juni 2017	Golden Suki
9	Buka Puasa Bersama Petugas Kebersihan dan Bagi-bagi sembako	Juni 2017	Ballroom Lt. 5 BHM
10	Bakti Kebersihan Masjid	Setiap Sabtu Pada Bulan Ramadhan, Juni 2017	Masjid Raya, Masjid RRI
11	Senam Satu Dunia Bersama Kecamatan Wajo	13 Agustus 2017	Jl. Sulawesi (Samping Klenteng Xian Ma)
12	Gathering Instansi Ladokgi	15 Agustus 2017	Rest Golden Suki
13	Sunatan Massal Bersama Lantamal VI	26 Agustus 2017	Lantamal VI TNI AL Mks
14	Bakti Sosial Kesehatan Bersama Ladokgi	30 Agustus 2017	Pelabuhan Paotere Mks
KANTOR CABANG DAYA			
15	Bakti Sosial medical cek up	19 Feb 2017	Pura Giri Natha Makassar
16	Kerja Bakti Kebersihan Menyambut bulan Ramadhan	03 Juni 2017	Halaman Masjid Jami Nurul Iman Telkomas

17	Berbagi care ke Pasien Rs di bulan Ramadhan	05 Juni 2017	Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Perintis Makassar,
18	Buka Puasa Bersama Mitra Bank (Bendahara)	06 Juni 2017	Hotel Harper Perintis Mks
19	Berbagi care ke Pasien Rs di bulan Ramadhan	08 Juni 2017	Rumah Sakit Tadjuddin Paccerrakkang Daya
20	Berbagi care ke Pasien Rs di bulan Ramadhan	12 Juni 2017	Rumah Sakit Salewangan Maros
21	Berbagi care ke Pasien RS di bulan Ramadhan	15 Juni 2017	Rumah Sakit Sayang Rakyat Mks
22	Pembagian Ta'jil buka puasa	15 Juni 2017	Depan Kosekhanudnas II Daya Mks
23	Buka Puasa Bersama dan pembagian sembako ke Petugas Kebersihan Kec Biringkanaya	21 Juni 2017	RM. Dafes Daya Makassar
24	Kerja Bakti Kebersihan	26 Agustus 2017	Jl. Telkomas Kel Untia Kec Biringkanaya
25	Bakti Sosial; Panti Asuhan	27 November 2017	Yonif 700 Raiders Perintis Mks
KANTOR CABANG GOWA			
26	Kerja Bakti Kebersihan Rumah Ibadah	6 Mei 2017	Gereja Kanatojeng Aspol Batangkaluku
27	Kerja Bakti Kebersihan	27 Mei 2017	Kantor Cab. Gowa dan sekitarnya
28	Pembagian Ta'jil Buka Puasa	2 Juni 2017	Kantor Cab. Gowa
29	Kerja Bakti Kebersihan Rumah Ibadah	3 Juni 2017	Mesjid Baiturrahim Kel. Bontobontoa
30	Anjangsana Rumah Sakit	5 Juni 2017	RSUD Syekh Yusuf
31	Anjangsana Rumah Sakit	8 Juni 2017	RSUD Syekh Yusuf
32	Kerja Bakti Kebersihan Rumah Ibadah	10 Juni 2017	Mesjid Baiturrahman Samping BPD
33	Anjangsana Rumah Sakit	12 Juni 2017	RSUD Syekh Yusuf
34	Anjangsana Rumah Sakit	15 Juni 2017	RSUD Syekh Yusuf
35	Kerja Bakti Kebersihan Rumah Ibadah	17 Juni 2017	Mesjid Aspol Batangkaluku
36	Buka Puasa Bersama: Bendahara Instansi	17 Juni 2017	Hotel Romedo Makassar
37	Anjangsana Rumah Sakit	19 Juni 2017	RS Mattiro baji
38	Buka Puasa Bersama: Petugas Kebersihan	20 Juni 2017	Kantor Cab. Gowa
39	Bhakti kebersihan di Area Balla Lompoa	25 November 2017	Seputar Balla lompoa
KANTOR CABANG BONE			
40	Gathering Imlek (Bai Nian)	29 Jan 2017	Marino Resto Novena Hotel
41	Penghijauan	19 Maret 2017	Kel. Waetuo, Kec. Tanete Riantang Timur Kab. Bone

42	Bakti Kebersihan Vihara Dharma Palakka	22&29 April 2017	Halaman Vihara Dharma Palakka
43	Medical Cek Up (Perayaan waisak)	07 Mei 2017	Vihara Dharma Palakka
44	Gathering Arisan Amal Damamitra	19 Mei 2017	MKopi Tiam
45	Bakti kebersihan Mesjid	Setiap sabtu dibulan juni 2017	Masjid Miftahul Khair, Masjid Nur Salam
46	Anjongsana ke Rumah Sakit	Setiap kamis dibulan juni	RS Hapsa, RS M Yasin & RS Tenriawaru
47	Buka Puasa Bersama Bendahara	14 Juni 2017	MKopi Tiam
48	Pembagian Paket Sembako dengan petugas kebersihan	15 Juni 2017	Kantor BPR hasamitra
49	Gathering Arisan Amal Gereja Kalam Kudus	01 Agustus 2017	MKopi Tiam
50	Penghijauan	14 Oktober 2017	Kecamatan Barebbo
51	Sunatan Masal kerjasama dengan Brimob Den C	21 Oktober 2017	Aula Detasemen C Brimob
52	Pembagian Paket Sembako ke Ke Panti Asuhan AL Hijrah	15 November 2017	Kantor BPR hasamitra
53	Bakti Kebersihan Gereja Toraja	09 Desember 2017	Halaman Gereja Torana Kecamatan Tanete Riattang kel. Masumpu
KANTOR CABANG PALOPO			
54	Bakti Sosial: Membersihkan Vihara Cakrawala Dharma Indonesia	25 Februari 2017	Jl. Kelapa, Kota Palopo
55	Bakti Sosial: Membersihkan Gereja Talitakum	18 Maret 2017	Jl. Opu Tosappaile, Kota Palopo
56	Baksos: Senam & Membersihkan di Vihara Cakrawala Dan Vihara Budi Bhakti	06 Mei 2017	Jl. Landau, Kota Palopo
57	Bagi Takjil di Wilayah Kodim 1403 Sawerigading	30 Mei 2017	Jl. Balai Kota, Kota Palopo
58	Anjongsana di RSUD Sawerigading	02 Juni 2017	Jl. Ratulangi, Rampoang, Kota Palopo
59	Kerja Bakti di Masjid Al-Baraqah Terminal	03 Juni 2017	Jl. Kelapa, Kota Palopo
60	Buka Puasa Bersama Anak Yatim Panti asuhan AL-MUHAYMIN	06 Juni 2017	Lt. 2 Kantor BPR Hasamitra
61	Anjongsnaa di RS ST. Madyang	08 Juni 2017	Jl. Andi Kambo, Kota Palopo
62	Kerja Bakti di Masjid Al-Amanah Lagaligo	10 Juli 2017	Jl. Lagaligo, Kota Palopo

63	Anjongsana di RS Bintang Laut	15 Juni 2017	Jl. Muh. Kasim, Kota Palopo
64	Kerja Bakti di Masjid Weccudai	17 Juni 2017	Jl. Weccudai, Kota Palopo
65	Buka Puasa Bersama Petugas Kebersihan Kota Palopo	17 Juni 2017	Pelataran Parkir Kantor BPR Hasamitra
66	Anjongsana di RS Atmedika	22 Juni 2017	Jl. Andi Djemma, Kota Palopo
67	Lomba-lomba dalam rangka HUT RI buat masyarakat umum sekitar	17 Agustus 2017	Jl. Mangga, Kota Palopo
KANTOR CABANG PAREPARE			
68	Penanaman Pohon bersama BLH dan FKH	22 November 2017	Kebun Raya Jompie

BAB IX

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Hasil penilaian GCG pada BPR Hasa Mitra posisi 31 Desember 2017 adalah Baik dengan Nilai Komposit 1.35 (satu point tiga puluh lima) predikat sangat baik.

Terlampir hasil penilaian Self Assessment yang kami lakukan.

Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi GCG di BPR Hasa Mitra sehingga menjadi lebih Baik.

BAB X

PENUTUP

BPR Hasa Mitra dalam mewujudkan visi dan misinya, menanamkan tatanan nilai (*value*) yang diharapkan dapat mengawal dan membentengi perjalanan untuk tetap sehat dan kuat. Tatanan Nilai yang dimaksud adalah Kepercayaan (*TRUST*), Integritas (*Integrity*), Profesionalisme (*Professionalism*), Kehati-hatian (*Prudence*).

Value inilah kami patikan dalam komitmen kesetiaan “CATUR PRASETYA BPR HASA MITRA” kepada segenap pengurus dan karyawan untuk membangun dan mengantarkan BPR Hasa Mitra mewujudkan VISI-nya. Dan Laporan Tata Kelola ini, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan praktek perbankan yang lebih baik.

Manajemen BPR Hasa Mitra, senantiasa meminta dukungan, saran dan kritik yang konstruktif kepada semua pihak terkhusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga-lembaga terkait dan masyarakat secara umum, untuk BPR Hasa Mitra yang lebih baik.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengantarkan BPR Hasa Mitra tetap eksis menjalankan visi & misi usahanya sebagai Social Bussines Enterprise dalam mensejahterahkan masyarakat.